

KUNJUNGAN BPK RI JADI MOTIVASI BENAHAI KEUANGAN PEMKOT



Kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dijadikan sebagai motivasi untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan secara baik pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱ dilingkup Pemkot Ambon.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menuturkan, silaturahmi ini sekaligus berbagi pengalaman selaku Anggota IV BPK RI dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan pada masalah keuangan bagi penyelenggara pemerintahan di Kota Ambon. Walikota Ambon berterima kasih atas kehadiran Anggota IV BPK RI untuk melakukan kegiatan silaturahmi dilingkup Pemkot, sehingga upaya untuk pembentukan motivasi kepada segenap jajaran Pemkot Ambon dapat membenahi keuangan secara baik. Hal tersebut dikemukakan oleh Walikota Ambon dalam sambutannya saat menerima silaturahmi Pihak BPK RI di Lantai II Balai Kota Ambon Selasa (11/3).

Dikatakan oleh Walikota Ambon, inilah satu motivasi terhadap segenap jajaran Pemkot Ambon dalam upaya untuk membenahi pengelolaan keuangan secara baik, dan lewat kegiatan ini juga ditahun ini Pemkot Ambon harus betul-betul memiliki opiniⁱⁱ paling tidak Wajar Dengan Pengecualian (WDP)ⁱⁱⁱ.

Menurut Walikota Ambon, jika dilihat dari manajemen keuangan memang sudah cukup baik, namun dari segi sains, pengelolaannya harus dipahami juga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dengan baik, karena apapun keuangan itu diperuntukkan guna mempercepat kesejahteraan rakyat. Jadi dengan kehadiran pihak BPK RI ini untuk memberikan motivasi kepada pengelola keuangan dalam hal ini Pemkot Ambon dan seluruh SKPD yang ada, agar dapat menjalankan tugas keuangan negara^{iv} dengan baik.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI, Ali Masyikur Musa, kepada wartawan menjelaskan, silaturahmi ini bertujuan untuk dapat mempersiapkan diri dalam rangka mengelola keuangan, sebab keuangan negara diperuntukkan guna mempercepat kesejahteraan rakyat. Jadi, kehadirannya sebagai Anggota BPK ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pengelola keuangan dalam hal ini pihak Pemkot Ambon dan seluruh SKPD yang ada agar dapat menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara itu dengan baik.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 12 Maret 2014

ⁱ **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

ⁱⁱ **Opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

ⁱⁱⁱ **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.

^{iv} **Keuangan Negara**, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].